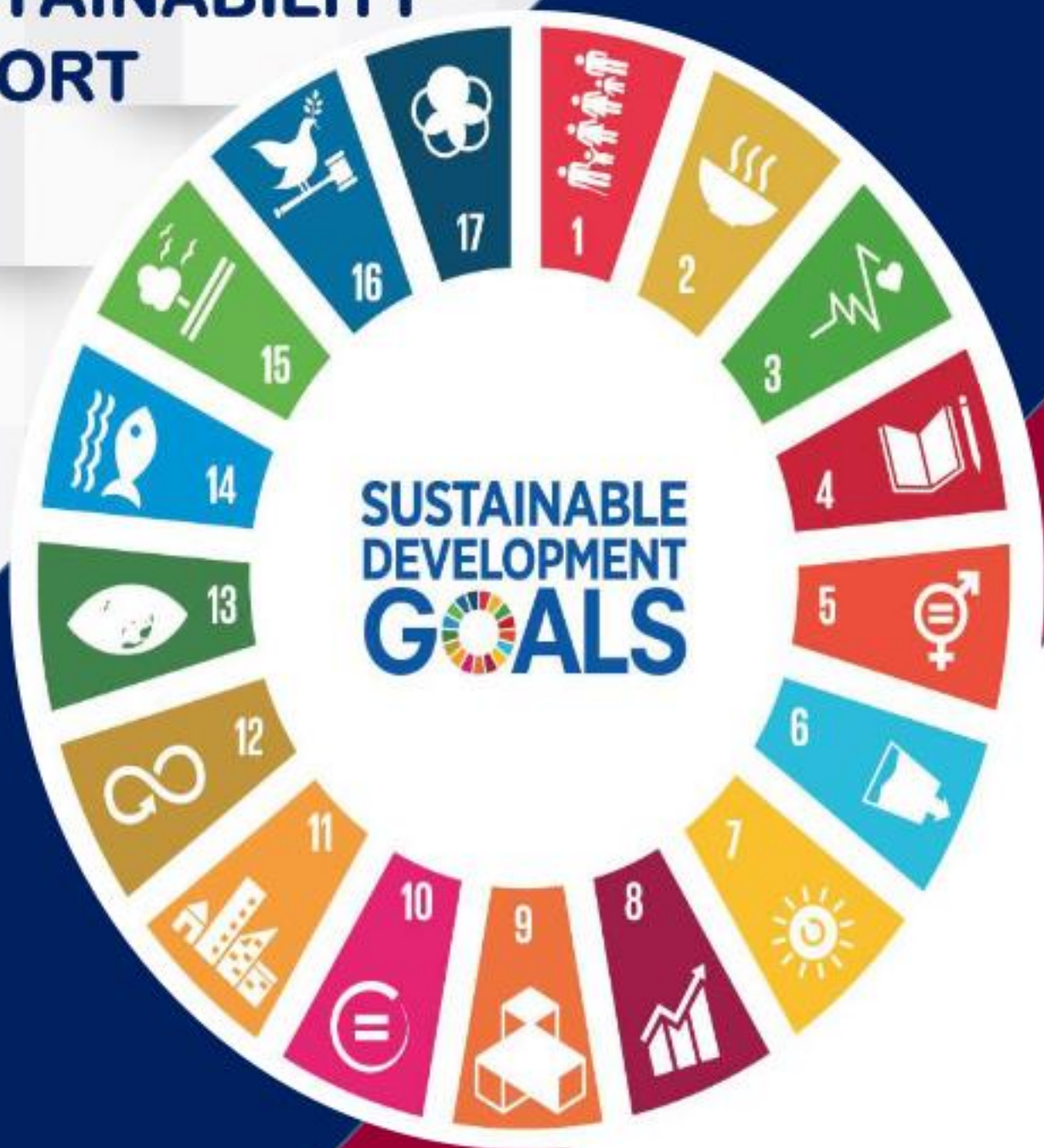


2021

SUSTAINABILITY REPORT



Inter CAFE

*International Center for Applied Finance and
Economics*

PENGANTAR

INTRODUCTION



SDGs merupakan kesepakatan bersama masyarakat internasional mewujudkan tingkat kehidupan yang lebih baik terkait dengan kemampuan daya dukung yang semakin tertekan.

Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam dokumen target menurut aspek SDGs sehingga menjadi acuan dalam mencapai jalan peta capaian SDGs.

Sustainability Report ini berkontribusi dalam mewujudkan upaya mencapai target SDGs tersebut sesuai dengan bidang atau kompetensi InterCAFE sebagai lembaga kajian yang terkait dengan keuangan dan ekonomi terapan.

The SDGs are an agreement with the international community to achieve a better standard of living related to the increasingly depressed supporting capacity.

The agreement is included in the target document according to the SDGs aspect so that it becomes a reference in achieving the SGD road map.

This sustainability report contributes to achieve the SDGs targets in accordance with the fields or competencies of InterCAFE as a research center on applied finance and economics.

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MA.Ec
Kepala Pusat InterCAFE IPB
Director of InterCAFE IPB

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pengantar <i>Introduction</i>	2
Daftar Isi <i>Contents</i>	2
Kerjasama <i>Partnership</i>	3
Kajian <i>Development Impact</i> (Dampak Sosial dan Ekonomi) terkait Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Pesawat Udara dan PKE Kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah - Indonesia <i>Eximbank</i>	4
<i>Study on Development Impacts (Social and Economic) of Aircraft PKE Program and Africa South Asia and Middle East Region PKE Indonesia Eximbank</i>	
Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah	6
<i>Study on the Inequality of Land Tenure and Land Ownership</i>	
Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi atas Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) T.A 2015-2021 kepada PT PLN (Persero)	8
<i>Study on Social and Economic Impacts of National Capital Investment 2015-2021 to PT PLN (Persero)</i>	
Sinkronisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan Dengan Manfaat Program BPTAPERA	10
<i>Synchronization of Housing Additional Service Benefits (MLT) with BP TAPERA Program Benefits</i>	
Kajian Sektor dan Makro Sektor Pembiayaan Perumahan dan Pembangunan Perumahan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	12
<i>Sector and Macro Studies of Housing Financing and Housing Development Sector PT Sarana Multigriya Financial (Persero)</i>	

KERJASAMA

PARTNERSHIP

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)



Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI)/
Indonesia Eximbank



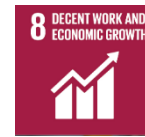
PT PLN (Persero) Tbk.



BPJS Ketenagakerjaan



PT Sarana Multigriya
Finansial (Persero)



Kajian *Development Impact* (Dampak Sosial dan Ekonomi) terkait Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Pesawat Udara dan PKE Kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah Indonesia Eximbank

Study on Development Impacts (Social and Economic) of Aircraft PKE Program and Africa South Asia and Middle East Region PKE Indonesia

PT Wijaya Karya dan PT Dirgantara Indonesia berencana mengajukan fasilitas modal kerja ekspor kepada LPEI melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE), dimana pembayaran atas pembiayaan diberikan kepada badan usaha dalam negeri yang mendapatkan kontrak luar negeri dengan memperhatikan kesiapan proyek dan kebutuhan nasabah. Peran LPEI atas fasilitas pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan tentu memiliki nilai efek pengganda dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran *developmental impact* (aspek ekonomi dan sosial) dari fasilitas pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor terhadap PT Wijaya Karya dan PT Dirgantara Indonesia menjadi penting untuk diketahui agar kapabilitas dan fungsional dari LPEI dalam mendukung pelaksanaan visi dan misinya mengembangkan ekspor Indonesia khususnya dari sisi ekspor jasa di bidang konstruksi dapat semakin ditingkatkan.

Pembiayaan Skema Penugasan Khusus Dorong Peningkatan Ekspor

Fasilitas pembiayaan melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan LPEI kepada PT Wijaya Karya untuk pembangunan proyek apartemen di Aljazair memberikan dampak positif terhadap PDB Indonesia. Sementara nilai *developmental impact* dari adanya fasilitas pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan kepada PT Wijaya Karya berada dalam kisaran 7.2 kali hingga 16.4 kali dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh LPEI.

Dampak positif pembiayaan ekspor terhadap PDB Indonesia juga terlihat dalam pembiayaan yang diberikan pada PT Dirgantara Indonesia untuk proyek ekspor Pesawat ke Nepal dan Senegal.

PT Wijaya Karya and PT Dirgantara Indonesia plan to apply for buyer's credit facilities to Indonesia Eximbank through the National Interest Account (NIA) scheme, where payments for financing are given to domestic business entities that get foreign contracts by taking into account project readiness and customer needs. Indonesia Eximbank role in the financing facility for the NIA provided certainly has a multiplier effect in the Indonesian economy. Therefore, measuring the developmental impact (economic and social aspects) of NIA facility in export for PT Wijaya Karya and PT Dirgantara Indonesia is important to know so that the capabilities and functionalities of Indonesia Eximbank in supporting the implementation of its vision and mission to develop Indonesian exports, especially in terms of exports services in the construction sector can be further improved.

Financing for National Interest Account (NIA) Improve Export Performance

The financing facility through the Special National Interest Account (NIA) in Export scheme provided by the Indonesia Eximbank to PT Wijaya Karya for the construction of an apartment project in Algeria has a positive impact on Indonesia's GDP. Meanwhile, the value of the developmental impact after receiving financial support for the Special National Interest Account (NIA) in Export scheme provided to PT Wijaya Karya is in the range of 7.2 times to 16.4 times the value of the financing provided by the Indonesia Eximbank.

The positive impact of export financing on Indonesia's GDP is also seen in the financing provided to PT Dirgantara Indonesia for the aircraft export project to Nepal and Senegal.

Sementara itu, nilai *developmental impact* dari adanya fasilitas pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk proyek perakitan pesawat cukup tinggi dalam kisaran 35 kali hingga 53 kali dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh LPEI. Artinya multiplier yang diciptakan dari adanya program PKE NIA kepada PT Dirgantara Indonesia sangat tinggi sekali. Sementara terhadap ekspor, adanya fasilitas pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan kepada PT Dirgantara Indonesia memberikandampak *money multiplier* terhadap ekspor sebesar 4.1 kali hingga 4.8 kali.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap dua proyek strategis ini juga memberikan pengaruh positif terhadap angka konsumsi, investasi, ekspor, dan impor.

Dukungan terhadap Proyek Infrastruktur Strategis di Negara Non Tradisional

Pembiayaan yang dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, dalam hal ini ekspor jasa konstruksi. Kesungguhan Pemerintah terlihat dari diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 1/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Disamping itu Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) diharapkan menjadi langkah awal Indonesia untuk menembus pasar internasional serta memperkuat hubungan bilateral khususnya dalam bidang perdagangan dengan Negara-negara di kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah.

Kemiskinan Nasional Menurun

Secara umum, penyaluran pembiayaan untuk skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Namun, dampak terhadap pendapatan yang diterima antar kelompok masyarakat cenderung lebih baik kepada kelompok Masyarakat Kota yang menyebabkan terjadi kenaikan ketimpangan secara marjinal.

Meanwhile, the value of the developmental after receiving financial support for the Special National Interest Account (NIA) in Export scheme provided to PT Dirgantara Indonesia for the aircraft assembly project is quite high in the range of 35 times to 53 times the financing value provided by the Indonesia Eximbank. This means that the multiplier created by the PKE NIA program for PT Dirgantara Indonesia is very high. Meanwhile for exports, the financing support for the Special National Interest Account (NIA) in Export scheme provided to PT Dirgantara Indonesia has a money multiplier impact on exports of 4.1 times to 4.8 times.

The financing provided by the Indonesia Eximbank for these two strategic projects also has a positive impact on consumption, investment, exports and imports.

Forms of Support for Strategic Infrastructure Projects in Non-Traditional Countries

The financing carried out by the Indonesian Export Financing Agency is a form of Government support to improve Indonesia's export performance, in this case the export of construction services. The Government of Indonesia intention can be seen from the issuance of the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 1/KMK.08/2019 about National Interest Account (NIA) to the Indonesia Eximbank to Encourage Exports to Countries in Africa, South Asia, and the Middle East. In addition, the National Interest Account (NIA) in export is expected to be Indonesia's first step to penetrate the international market and strengthen bilateral relations, especially in trade with countries in Africa, South Asia and the Middle East.

National Poverty Decreases

In general, financing facilities for the National Interest Account (NIA) in export is able to reduce the national poverty level. However, the impact on income received between community groups tends to be better for urban community groups which causes an increasing in marginal inequality.

Periode: 22 April – 20 Juni 2021
Tempat: Indonesia (Data Sekunder)
Kata Kunci: LPEI, PKE, NIA, WIKA, PT DI
Link Berita: shorturl.at/jHMUZ

Period: 20 April – 20 June 2021
Place: Indonesia (Secondary Data)
Keywords: LPEI, PKE, NIA, WIKA, PT DI
News Link: shorturl.at/jHMUZ



Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Study on the Inequality of Land Tenure and Land Ownership

Dalam rangka mengatasi ketimpangan agraria dan mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah menjalankan program Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang strategis dalam menjalankan program Reforma Agraria, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bukan merupakan hal yang mudah, mengingat masalah ini merupakan akumulasi dari berbagai aspek permasalahan tanah yang terkait erat dengan aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan kajian untuk mendapatkan angka ketimpangan tanah di Indonesia yang nantinya dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam menekan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dengan merumuskan kebijakan yang optimal.

Ketimpangan Lahan di Indonesia

Kepemilikan tanah perorangan di Indonesia sepanjang periode 2014 hingga 2021 cenderung menurun. Nilai Indeks Gini berdasarkan hasil perhitungan untuk periode tersebut menunjukkan masih terjadinya ketimpangan lahan yang tinggi. Provinsi dengan pertumbuhan ketimpangan yang tinggi selama tahun 2014-2021 rata-rata berada pada Indonesia bagian Timur, seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah. Sementara Provinsi dengan pertumbuhan ketimpangan lahan perorangan dan hak milik yang semakin menurun selama tahun 2014-2021 adalah Maluku Utara, Bangka Belitung, Maluku, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Bengkulu dan beberapa provinsi lainnya.

In order to solve agrarian inequality and realize an even distribution of the structure of land tenure, ownership, land use and land utilization, the government carries out the Agrarian Reform program. The Ministry of ATR/BPN has a strategic role in carrying out the Agrarian Reform program, especially in an effort to realize an even distribution of the structure of land tenure, ownership, land use, and land utilization. Overcoming inequality in land tenure and ownership is not an easy task, considering that this problem is an accumulation of various aspects of land problems that are closely related to socio-cultural, economic and political aspects. Therefore, the first step that needs to be done now is to conduct a study to get the number of land inequality in Indonesia which can later become a reference and source of information for the Ministry of ATR/BPN in reducing inequality in land tenure in Indonesia by formulating optimal policies.

Land Inequality in Indonesia

Individual land ownership in Indonesia during the period 2014 to 2021 tends to decline. The Gini Index value based on the calculation results for the period shows that there is still a high level of land inequality. Provinces with high inequality growth during 2014-2021 were on average in Eastern Indonesia, such as Papua, West Papua, West Sulawesi, West Nusa Tenggara, and Central Kalimantan. Meanwhile, the provinces with growing inequality of individual land and property rights that are decreasing during 2014-2021 are North Maluku, Bangka Belitung, Maluku, East Java, West Java, Gorontalo, Bengkulu and several other provinces.

Lebih lanjut, Program redistribusi secara nyata memiliki pengaruh yang baik dalam perbaikan angka Indeks Gini. Percepatan program redistribusi secara langsung akan merubah *dead capital* menjadi *productive capital*. Selain itu, fakta di lapangan nilai ekonomi lahan meningkat pasca program redistribusi.

Hubungan Antara Ketimpangan Lahan dengan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan kepemilikan lahan perorangan memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila terjadi penurunan ketimpangan kepemilikan lahan perorangan maka dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Rekomendasi Kebijakan

Perlu adanya perluasan dan percepatan kebijakan redistribusi tanah yang dilakukan BPN. Hal ini didukung dari hasil temuan dimana setelah adanya program redistribusi pada tahun 2018 terjadi penurunan ketimpangan penguasaan lahan sebesar 0.22 per tahun.

Terkait metode pengukuran ketimpangan lahan, pengukuran tingkat ketimpangan lahan tetap menggunakan konsep Kurva Lorenz dan Indeks Gini dengan menggunakan data nilai tanah. Penggunaan data nilai tanah dibanding data luas tanah dalam mengukur ketimpangan tanah lebih representatif karena ada perbedaan nilai tanah antar lokasi. Kedepannya data tanah di BPN dapat dilengkapi kolom nilai tanah sebagai tambahan informasi yang diantaranya dapat dimanfaatkan untuk alternatif analisis ketimpangan lahan.

Furthermore, the redistribution program actually has a good influence in improving the Gini Index. The acceleration of the redistribution program will directly change *dead capital* into *productive capital*. In addition, the facts on the ground that the economic value of land increased after the redistribution program.

The Relationship Between Land Inequality and Regional Economic Growth

Inequality of individual land ownership has a negative relationship with economic growth. That is, if there is a decrease in inequality of individual land ownership, it can encourage increased economic growth in a region.

Policy Recommendations

It is necessary to expand and accelerate the land redistribution policy carried out by BPN. This is supported by the findings where after the redistribution program in 2018 there was a decrease in land tenure inequality by 0.22 per year.

Regarding the method of measuring land inequality, the measurement of the level of land inequality still uses the concept of the Lorenz Curve and the Gini Index using land value data. The use of land value data compared to land area data in measuring land inequality is more representative because there are differences in land values between locations. In the future, land data at BPN can be equipped with a land value column as additional information, some of which can be used for alternative land inequality analysis.

Periode: 18 Mei – 31 Desember 2021

Tempat:

1. Desa Borisallo, Sulawesi Selatan
2. Desa Sinarjaya, Jawa Barat
3. Pekon Margosari, Lampung
4. Desa Peniti Dalam II, Kalbar

Kata Kunci: BPN, Ketimpangan Lahan, Kepemilikan Lahan, Indeks Gini
Link Berita: shorturl.at/frLV4

Period: 18 May – 31 December 2021

Place:

1. Desa Borisallo, South Sulawesi
2. Desa Sinarjaya, West Java
3. Pekon Margosari, Lampung
4. Desa Peniti Dalam II, West Kalimantan

Keywords: BPN, Land Tenure, Land Ownership, Gini Index



Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi atas Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) T.A 2015-2021 kepada PT PLN (Persero)

Study on Social and Economic Impacts of National Capital Investment 2015-2021 to PT PLN (Persero)

Sebagai wujud dukungan pemerintah, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, PT PLN (Persero) telah memperoleh penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara tunai sebesar Rp 40.06 triliun yang dipergunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pembangkitan, transmisi, dan distribusi termasuk diantaranya pelaksanaan Program Listrik Desa Pembangkit EBT Penunjang Program LISDES. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pemberian PMN diperlukan suatu kajian untuk menghitung dampak sosial dan ekonomi atas pelaksanaan proyek-proyek ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dari dana PMN baik untuk pembangkitan, transmisi dan distribusi termasuk di dalamnya program Listrik Desa (LISDES) sehingga dapat dijadikan tambahan informasi bagi pemangku kepentingan.

Penambahan PMN Meningkatkan Daya Saing Regional dan Nasional serta Pemerataan Ekonomi

Penambahan PMN pada PT PLN selama kurun waktu 2015 hingga 2020 ditambah dengan prognosa tahun 2021 berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional (dengan proxy PDB). Peningkatan nilai PDB tersebut juga diikuti oleh peningkatan komponen-komponen penyusun PDB lainnya, seperti konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga/LNPRT (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M). Sementara hasil perhitungan *development impact* menunjukkan bahwa setiap penambahan PMN pada PT PLN sebesar Rp 1 Miliar selama periode 2015-2021 berkontribusi terhadap peningkatan PDB dalam perekonomian nasional sebesar Rp 1.91 Miliar. Berdasarkan sektor ekonominya, penambahan PMN menghasilkan output tertinggi pada proyek-proyek ketenagalistrikan,

As a form of government support, during 2015 to 2020, PT PLN (Persero) has obtained additional National Capital Investment in cash amounting to Rp 40.06 trillion which is used to finance the construction of power plant, transmission and distribution projects including the implementation of the Village Electricity Program for NRE Power Plant that supporting the LISDES Program. Based on these things, in order to measure the level of effectiveness of National Capital Investment grants, a study is needed to calculate the social and economic impacts of the implementation of electricity projects that have been implemented by PT PLN (Persero) from National Capital Investment funds for power plant, transmission and distribution including Village Electricity Program (LISDES) so that it can be used as additional information for stakeholders.

The addition of PMN Increases Regional and National Competitiveness and Economic Equity

The addition of PMN to PT PLN during the period 2015 to 2020 coupled with the 2021 prognosis will contribute to increasing national income (by proxying GDP). The increase in the value of GDP was also followed by an increase in other components of GDP, such as household consumption and Household Non-Profit Institutions/LNPRT (C), investment (I), government spending (G), exports (X), and imports. (M). Meanwhile, the results of the development impact calculation show that every additional PMN at PT PLN is Rp. 1 billion during the 2015-2021 period, which contributes to an increase in GDP in the national economy of Rp. 1.91 billion. Based on the economic sector, the addition of PMN produces the highest output in electricity projects,

Baik proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan Pembangkit EBT Penunjang LISDES.

Kontribusi Mensukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana salah satunya diimplementasikan dalam program Listrik Desa merupakan program prioritas Pemerintah Indonesia yang masuk ke dalam list Proyek Strategis Nasional dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di seluruh Indonesia serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional. Proyek pembangunan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang juga tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021-2030.

Dana PMN yang diperoleh PT PLN pada tahun 2021 berjumlah Rp. 5 Triliun dan digunakan untuk mendanai proyek – proyek sektor transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa, pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), serta untuk menunjang program listrik desa (lisdes) dimana 44.20 persen digunakan untuk mendanai proyek distribusi listrik pedesaan, 7.82 persen untuk proyek listrik non pedesaan, 42.37 persen untuk proyek transmisi dan gardu induk, serta 5.60 persen untuk proyek KIT EBT.

Kesenjangan dan Kemiskinan Menurun

Selain dampaknya terhadap perekonomian, penambahan PMN untuk proyek-proyek ketenagalistrikan PT PLN (Persero) telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral khususnya yang bekerja di Sektor Listrik serta Sektor Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi dimana kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh PT PLN sehingga menghasilkan akumulasi output sektoral tertinggi dibandingkan sektor tertinggi lainnya.

both in the transmission and distribution sector projects, including the implementation of the village electricity program and the LISDES Supporting EBT Generator.

Contribution to the Success of the National Strategic Project (PSN)

The electricity infrastructure development program, one of which is implemented in the Village Electricity program, is a priority program of the Government of Indonesia which is included in the list of National Strategic Projects with the aim of ensuring the fulfillment of electricity needs throughout Indonesia and encouraging the growth of domestic industry which will ultimately improve the national economy. The electricity development project carried out by PT PLN is supported by Presidential Regulation No. 4 of 2016 concerning the Acceleration of Electricity Infrastructure Development, which is also contained in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero) for 2021-2030.

PMN funds obtained by PT PLN in 2021 amounted to Rp. 5 trillion and is used to fund transmission, substation, and distribution sector projects, including the implementation of village electricity programs, Renewable Energy (EBT) generation, as well as to support the village electricity program (Lisdes) of which 44.20 percent is used to fund distribution projects. rural electricity, 7.82 percent for non-rural electricity projects, 42.37 percent for transmission and substation projects, and 5.60 percent for KIT EBT projects.

Inequality and Poverty Decrease

In addition to its impact on the economy, the addition of PMN for PT PLN (Persero) electricity projects has increased the absorption of sectoral workers, especially those working in the Electricity Sector and the Building and Electrical Installation, Gas, Drinking Water and Communications Sector where both sectors are directly related to the project. -projects carried out by PT PLN that result in the highest accumulation of sectoral output compared to other highest sectors.

Periode: 05 Nov 2021 – 05 Feb 2022
Tempat: Indonesia (Data Sekunder)
Kata Kunci: PLN, PMN, Listrik Desa

Period: 05 Nov 2021 – 05 Feb 2022
Place: Indonesia (Secondary Data)
Keywords: PLN, PMN, Village Electricity



Sinkronisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan Dengan Manfaat Program BPTAPER A

Synchronization of Housing Additional Service Benefits (MLT) with BP TAPER A Program Benefits

Pusat Kajian Internasional untuk Ekonomi dan Keuangan Terapan atau International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB University melakukan kajian sinkronisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan dengan manfaat program BPTAPER A. Kajian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah dalam hal penyediaan rumah yang layak huni serta dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. MLT Perumahan sendiri merupakan program pembiayaan perumahan yang bersifat opsional bagi peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa pilihan MLT Perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah: 1) Pembiayaan perumahan dalam bentuk pinjaman uang muka perumahan (PUMP); 2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Non-Subsidi; 3) Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP); atau 4) Kredit Konstruksi. Sementara BPTAPER A merupakan badan pengelola tabungan perumahan yang target manfaatnya diperuntukkan tidak hanya bagi PNS, tetapi juga mencakup pekerja Non-PNS baik dari sektor formal maupun sektor informal.

Dengan adanya kemiripan baik dari karakteristik manfaat untuk kepemilikan rumah yang diberikan dan karakteristik kepesertaan yang menjadi target MLT Perumahan dan TAPER A, maka hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan baik dari peserta maupun pemberi kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan suatu kajian terhadap Manfaat Layanan Tambahan Perumahan dan pemanfaatan JHT bagi penerimanya untuk meningkatkan dan menguatkan program JHT.

Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan dan pemerintahan nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertumbuhan populasi di wilayah-wilayah ini.

The International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB University conducted a synchronization study of the Additional Housing Services Benefits (MLT) with the BPTAPER A program benefits. This study was conducted as a form of support for the Government's program in terms of providing housing that is livable and accessible to the people of Indonesia. MLT Housing itself is an optional housing financing program for participants of the BPJS Employment JHT Program. Several housing MLT options that can be utilized by BPJS Employment JHT participants are 1) Housing financing in the form of a housing down payment loan (PUMP); 2) Subsidized and Non-Subsidized Home Ownership Loans; 3) Housing Renovation Loans (PRP); or 4) Construction Credit. Meanwhile, BPTAPER A is a housing savings management body whose target benefits are not only for civil servants but also for non-civil servant workers from both the formal and informal sectors.

Given the similarity in both the characteristics of the benefits for the ownership of the house provided and the characteristics of the participation which are the targets of the Housing MLT and TAPER A, this raises several questions from both participants and employers. Based on the things above, a study is needed on the Benefits of Additional Housing Services and the use of JHT for recipients to improve and strengthen the JHT program.

Extreme poverty is often concentrated in urban areas and national and municipal governments are struggling to accommodate the growing population in these areas.

Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Hal ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, program MLT perumahan ini berkontribusi pada pemenuhan backlog perumahan nasional dan berguna bagi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama yang memasuki hari tua.

Creating safe and sustainable cities means ensuring access to safe and affordable housing, and improving slum settlements. It also involves investing in public transport, creating green spaces for the public, and improving urban planning and governance that is inclusive and inclusive. Adequate and affordable housing in the context of slum settlements within the framework of monitoring the SDGs uses five criteria, namely (1) building resilience; (2) adequate area of residence; (3) access to proper drinking water; (4) access to proper sanitation; and (5) security of residence. Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas is defined as a house that meets building safety requirements and the minimum adequacy of the building area and the health of its occupants, which can be reached by all levels of society. Based on the results of the study, the housing MLT program contributes to the fulfillment of the national housing backlog and is useful for meeting the need for decent housing for workers participating in BPJS Ketenagakerjaan, especially those entering old age.

Periode: 09 Ags 2021 – 12 Feb 2022
Tempat: Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara
Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, MLT Perumahan, JHT
Link Berita: shorturl.at/yFKMU

Period: 09 Aug 2021 – 12 Feb 2022
Place: Bali, DKI Jakarta, East Java, East Kalimantan, South Sulawesi, and North Sumatera
Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, MLT Perumahan, JHT
News Link: shorturl.at/yFKMU



Kajian Sektoral dan Makro Sektor Pembiayaan Perumahan dan Pembangunan Perumahan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Sector and Macro Studies of Housing Financing and Housing Development Sector PT Sarana Multigriya Financial (Persero).

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalin kerja sama dengan Pusat Kajian Internasional untuk Ekonomi dan Keuangan Terapan atau International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB University. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari pembiayaan dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT SMF terhadap perekonomian yang ditunjukkan dengan beberapa indikator pembangunan, seperti indikator penciptaan lapangan kerja, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini penting dilakukan dikarenakan sektor perumahan dan perekonomian nasional berpotensi memiliki efek pengganda dan mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian.

PT SMF sendiri berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan cara melakukan sinergisitas dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan, diantaranya melalui Program Perluasan Penyaluran Subsidi Perumahan (KPR FLPP). PT SMF melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (Kredit Mikro) dan inisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan kepemilikan rumah bagi MBR. PT SMF tetap aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah. Konsistensi penyaluran FLPP di tengah pandemi Covid-19 juga dilakukan dengan menyalurkan fasilitas pinjaman kepada developer/pengembang dalam bentuk Kredit Konstruksi sebagai upaya dalam mendukung sisi supply sektor perumahan. Masyarakat informal/non fixed income tetap diberikan akses untuk dapat memiliki rumah yang layak.

PT Sarana Multigriya Financial (Persero) or SMF collaborated with the International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB University. The collaboration is carried out to determine the social and economic impact of housing financing and construction carried out by PT SMF on the economy as indicated by several development indicators, such as indicators of job creation, human development, and improving people's welfare. This is important because the housing sector and the national economy have the potential to have a multiplier effect and can move other economic sectors in the economy.

PT SMF itself plays an active role in the National Economic Recovery (PEN) program by synergizing with Ministries/Institutions to support government programs in the housing sector, including through the Housing Subsidy Distribution Expansion Program (KPR FLPP). PT SMF cooperates in housing financing for workers in the informal sector (Micro Credit) and the initiation of a new program to support the affordability of homeownership for MBR. PT SMF remains active in providing long-term financing to both conventional and sharia channeling institutions. The consistency of FLPP distribution during Covid-19 pandemic was also carried out by distributing loan facilities to developers/developers in the form of Construction Loans as an effort to support the supply side of the housing sector. Informal/non-fixed income communities are still given access to be able to have a decent house.

Pemberian akses terhadap pemilik homestay untuk memanfaatkan dana PT SMF dalam pembangunan/renovasi rumah untuk dijadikan homestay. PT SMF juga bertindak selaku pelaksana investasi pemerintah pada Perumnas dalam rangka program PEN.

Diharapkan dengan adanya kajian ini PT SMF mampu meningkatkan efektifitas program-program yang telah diimplementasikan sehingga berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan prasarana dan sarana perumahan belum sepenuhnya terpenuhi, baik berupa lingkungan perumahan dan permukiman, maupun lingkungan yang terjangkau dan layak huni. Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik perkotaan atau perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses ke perumahan, infrastruktur, dan sumber daya. Keberpihakan pada penduduk miskin (pro poor) merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kepemilikan rumah layak. Pembiayaan dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT SMF harus “berkelanjutan”, yaitu mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Providing access to homestay owners to utilize PT SMF funds in the construction/renovation of houses to be used as homestays. PT SMF also acts as the executor of government investment in Perumnas within the framework of the PEN program.

It is hoped that with this study PT SMF can increase the effectiveness of the programs that have been implemented to contribute more to the national economy. The needs of the community and government for housing infrastructure and facilities have not been fully met, both in the form of housing and settlements, as well as affordable and livable environments. Settlements are part of the environment outside the protected area, either urban or rural, which functions as a place to live and place activities that support livelihoods and livelihoods. All communities have equal opportunities to gain access to housing, infrastructure, and resources. Taking sides with the poor (pro-poor) is a means to improve people's quality of life in the ownership of decent housing. The financing and housing development carried out by PT SMF must be “sustainable”, i.e. achieving social and economic goals that are in line with the principles of sustainable development.



Periode: 26 Ags – 25 Nov 2021

Tempat: Indonesia (Data Sekunder)

Kata Kunci: SMF, PEN, Kredit Mikro

Link Berita: shorturl.at/eDP07

Period: 26 Aug – 25 Nov 2021

Place: Indonesia (Secondary Data)

Keywords: SMF, PEN, Micro Credit

News Link: shorturl.at/eDP07



Inter CAFE

*International Center for Applied Finance and
Economics*

**Gedung Utama Lantai Atas
Kampus IPB Baranang Siang
Jl. Pajajaran, Bogor
Jawa Barat**

Phone: +62 251-8377896

E-mail: intercafe_ipb@apps.ipb.ac.id

Web: <https://intercafe.ipb.ac.id/>